

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara di dunia telah berkomitmen untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), disebut dengan tujuan dunia yang diadopsi *United Nations* sejak tahun 2015 untuk mengajak global agar terwujudnya *zero* kemiskinan, menjaga bumi, dan menjamin kedamaian dan kemakmuran seluruh manusia pada tahun 2030 (United Nations, 2023). Tujuan dunia terdiri dari 17 *goals* yang saling terintegrasi, di mana hal tersebut berarti tindakan pada satu bidang akan berpengaruh pada hasil bidang lainnya, serta perlu adanya keseimbangan pembaharuan yang didasarkan pada tiga pilar, antara lain keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Wahanisa dan Adiyatma, 2021).

Akses air bersih, sanitasi, kebersihan, dan semuanya yang penting bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah lama menjadi perhatian PBB. Hal tersebut terjadi karena air memiliki peran yang sangat vital, bukan hanya untuk menjaga kesehatan, namun juga dalam rangka pengentasan kemiskinan, kekuatan pangan, hak asasi manusia, kondisi lingkungan, serta pendidikan (Chandra, 2019). Selain itu, kebutuhan air bersih sangat penting pada sektor industri, pertanian, dan korporasi (Ningrum, 2018).

Mayoritas masyarakat tidak akan memiliki akses layanan air bersih, sanitasi, dan kebersihan yang penting pada tahun 2030 (Suryani, 2020). Pada tahun 2022, 2,2 miliar orang kekurangan akses air minum yang aman, termasuk 703 juta orang

tidak punya layanan air dasar; 3,5 miliar orang kekurangan sanitasi aman, termasuk 1,5 miliar orang tidak mempunyai layanan sanitasi dasar; dan 2 miliar orang kekurangan fasilitas cuci tangan dasar, termasuk 653 juta orang tidak punya fasilitas cuci tangan sama sekali (United Nations, 2023). Akibatnya, isu-isu seperti kelangkaan air, polusi, kerusakan lingkungan akibat air, dan kolaborasi mengenai wilayah perairan lintas batas terus dihadapi banyak negara.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa produksi yang dikuasai negara ialah sesuatu yang vital untuk negara serta mempunyai pengaruh penting terhadap kehidupan banyak orang (Ayat 2); dan bumi, air, serta potensi alam yang ada dimiliki oleh negara dan digunakan seutuhnya demi kemakmuran warga negara (Ayat 3). Sesuai undang-undang, pemerintah wajib menjamin hak setiap warganya agar mendapatkan akses air bersih. Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, negara memberikan jaminan air sebagai hak masyarakat agar terpenuhinya kebutuhan sehari-hari sehingga dapat hidup sehat dan bersih dengan kecukupan jumlah, mutu, keamanan, dan ekonomis. Pemerintah Indonesia berkomitmen agar mencapai tujuan 100% masyarakat mudah mengakses air minum dan fasilitas sanitasi. Sasaran kota dan desa dalam RPJMN 2020-2024 adalah 100% akses pada air minum dasar dan sanitasi.

Penyediaan air minum tidak sama dengan penyediaan air bersih. Air minum dibuat dari air bersih yang direbus. Batasan air yang sesuai syarat sistem penyediaan air minum adalah air yang dianggap bersih (Prasetyowati dan Indrawati, 2021). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, mengartikan air minum sebagai air yang harus berhasil melewati suatu bentuk penyaringan atau belum melalui penyaringan sama sekali sepanjang memenuhi persyaratan standar dan dapat dikonsumsi secara langsung. Agar air dapat dikonsumsi tanpa menimbulkan akibat negatif maka harus memenuhi standar mutu fisik, kimia, biologi, dan radiologi tertentu. Oleh karena itu, air minum wajib menjalani uji laboratorium untuk menunjukkan bahwa sumber air minum tersebut tidak terkontaminasi bakteri atau mampu menimbulkan penyakit, hal inilah yang menyebabkan adanya kompleksitas dalam tata kelola pemenuhan kebutuhan air minum (Haki, 2022).

Pengelolaan air minum di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM), serta dalam hal penyelenggaraannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Akses air minum layak di Indonesia sudah sebanyak 91,72% (Badan Pusat Statistik, 2023). Angka tersebut mengalami peningkatan 0,67% dibandingkan pada tahun 2022. Berdasarkan uji kualitas air minum rumah tangga yang dilakukan pada tahun 2020, hanya 8,3% wilayah pedesaan yang memiliki akses terhadap air minum bersih, dibandingkan dengan 15,3% wilayah perkotaan (Puslitbang Kemenkes, 2021). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan aksesibilitas air minum yang aman antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Survei Kualitas Air Minum tahun 2020 menunjukkan jenis sarana air minum dari mata air tidak terlindungi 2,5% dan dari

mata air terlindungi sebesar 4,2%. Sementara itu, 15,9% sarana air minum berasal dari sumur gali terlindung, 14,1% sumur bor, 3,8% sumur gali tidak terlindung, dan 13,1% air perpipaan (Puslitbang Kemenkes, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola air minum di Indonesia, khususnya untuk konsumsi rumah tangga, umumnya bertumpu pada sumur atau pipa. Sementara itu, RPJMN 2020-2024 mensyaratkan 100% masyarakat mempunyai akses air minum yang aman, yang mencakup 15% masyarakat mengakses air minum yang aman dan 30% masyarakat mengakses air minum perpipaan. Pencapaian target tersebut diperlukan adanya peningkatan yang cukup ekstrem setiap tahunnya.

Di Jawa Tengah sendiri, penyediaan air minum telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Adanya hal tersebut, total air minum yang disalurkan di seluruh wilayah Jawa Tengah mencapai 421,87 juta m³, disalurkan melalui perusahaan air minum di Jawa Tengah. Jumlah perusahaan air minum di Jawa Tengah pada tahun 2021 mengalami penurunan 5 perusahaan dan 25 cabang perusahaan air bersih daripada tahun 2020.

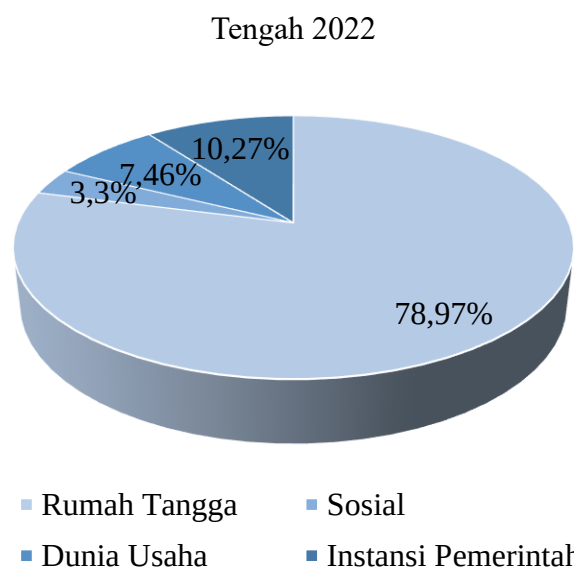
Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan dan Cabang Perusahaan Air Minum di Jawa



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2022.

Berdasarkan persentase pada grafik di atas, air minum yang diproduksi oleh badan usaha air minum diberikan kepada rumah tangga, kelompok sosial, dunia usaha, dan organisasi pemerintah, dengan proporsi sebagai berikut.

Gambar 1.2 Total Air Bersih yang Disalurkan Perusahaan Air Minum di Jawa



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2022.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020, akses air minum yang banyak digunakan rumah tangga di Jawa Tengah berasal dari air kemasan bermerek tercatat sebesar 27,73%; leding 12,99%; sumur bor atau pompa 19,23%; sumur terlindungi 18,02%; sumur tak terlindungi 1,77%; mata air terlindungi atau tidak terlindungi 19,37%; air permukaan 0,13%; air hujan 0,72%, dan sumber lainnya 0,04%, angka tersebut mengalami kenaikan 0,78% daripada tahun 2020 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022). Akses air minum layak di Jawa Tengah, baik di perkotaan maupun perdesaan, sudah mencapai 93,76% pada tahun 2023, di mana angka tersebut mengalami kenaikan daripada tahun 2021 yang mencapai angka sebesar 93,32% (Badan Pusat Statistik, 2023). Akses air minum masih didominasi oleh masyarakat perkotaan.

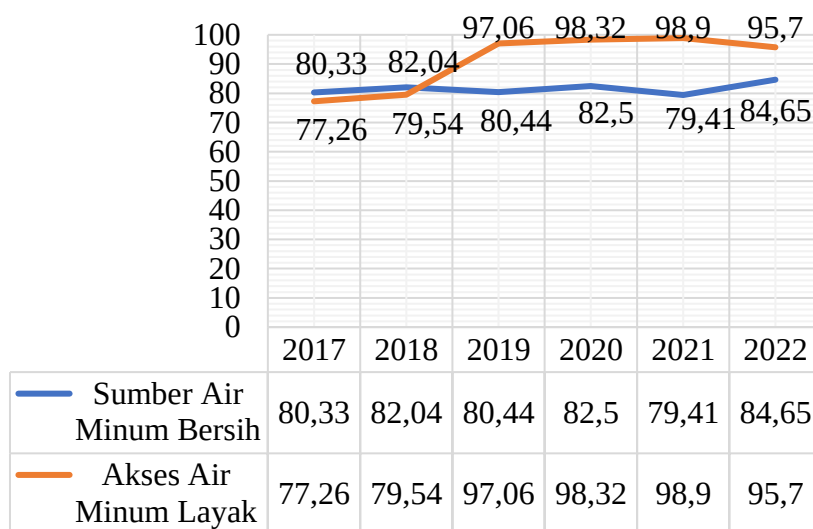
Gambar 1.3 Rumah Tangga di Jawa Tengah yang Mengakses Sumber Air Minum



Pencapaian yang belum mencapai hasil 100%, seluruh pemerintah kabupaten beserta masyarakat Jawa Tengah turut serta dalam mensukseskan perwujudan 100% akses air minum dan sanitasi untuk mewujudkan SDGs poin ke-

6, salah satunya adalah Kabupaten Pati. Komitmen Kabupaten Pati dalam mewujudkan SDGs poin ke-6 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yaitu dengan membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disebut Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bening pada 17 Februari 1992, dengan tugasnya melayani masyarakat Kabupaten Pati pada bidang air bersih dan air minum. Komitmen ini disahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati. Meskipun jumlah pelanggan terus mengalami kenaikan, namun kebutuhan air minum masyarakat Kabupaten Pati secara keseluruhan belum dipenuhi oleh Perumda Air Minum Tirta Bening. Hal tersebut karena letak Kabupaten Pati berada di lereng tenggara Gunung Muria maka kondisi geologi gunung tersebut sangat mempengaruhi kondisi hidrologinya, antara lain sungai-sungai mengering pada musim kemarau dan ada pula yang meluap pada musim hujan (BPBD Kabupaten Pati, 2020).

Gambar 1.4 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Sumber Air Bersih untuk Minum dan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Pati 2017-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Semakin banyak keluarga yang memiliki sumber air minum maka akan berdampak pada semakin tingginya tingkat kesehatan rumah tangga di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan semakin besarnya pemahaman masyarakat akan pentingnya minum dengan menggunakan air bersih bagi kesehatan.

Tabel 1.1 Sumber Air Bersih untuk Minum di Kabupaten Pati

Sumber Air Bersih untuk Minum	Persentase
Sumur yang digali	49,6%
Sumur pompa	0,1%
Jaringan pipa	9,7%
Tampungan air hujan	0,9%
Sumur artesis	0,2%
Sumber air lain	25,3%

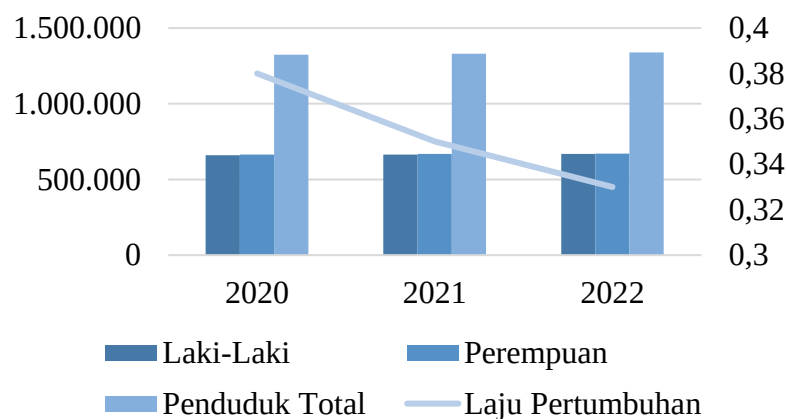
Sumber: Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Kabupaten Pati memiliki volume air sebanyak 11.631.863 m³, yang dimanfaatkan oleh Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati melayani 37.541 sambungan rumah pada tahun 2022 (Perumda Air Minum Tirta Bening

Kabupaten Pati, 2022). Berdasarkan data aktual cakupan masyarakat yang mengakses sumber daya tersebut sebanyak 52,99% penduduk perkotaan dan 22% penduduk perdesaan di Kabupaten Pati mempunyai akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan.

Kurang optimalnya akses air minum bagi seluruh masyarakat terjadi karena adanya peningkatan kebutuhan air bersih yang beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk (Marshanda dan Asri, 2023). Total jumlah penduduk Kabupaten Pati setiap tahunnya masih terus mengalami kenaikan, meskipun laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengalami penurunan. Kabupaten Pati termasuk dalam 10 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan penduduk terbanyak, totalnya 1.339.572 jiwa (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Gambar 1.5 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pati 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Dengan pertumbuhan penduduk menjadikan semakin banyak dan kompleks aktivitas manusia sehingga semakin beragam mata pencaharian masyarakat yang sesuai kondisi dan keunggulan daerahnya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran dan perubahan lahan yang digunakan sebagai penunjang ekonomi

masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, persoalan ini kemudian dijadikan sebagai salah satu isu bagi Kabupaten Pati. Di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Kabupaten Pati terus berkuat pada masalah tata kelola sumber daya air, air baku, air minum, sanitasi, jaringan jalan, dan drainase. Permasalahan persediaan air minum yang tidak memadai dan tidak aman merupakan salah satu permasalahan pekerjaan umum yang mendapat perhatian, khususnya di daerah pesisir yang memiliki kandungan garam tinggi pada sumber airnya.

Kondisi fisik Kabupaten Pati bagian utara dan timur yang berbatasan dengan Laut Jawa menjadi sorotan dalam persoalan pasokan air minum di wilayah pesisir dengan sumber air asin, tepatnya di Kecamatan Juwana. Luas wilayahnya yang sebesar 55,93 km², terdiri dari 29 desa yang sebagian besar daerah dataran rendah, dan terletak pada sepanjang pantai Laut Jawa yang memiliki tinggi muka tanah 1 -100 meter di atas permukaan air laut. Akibat kondisi geografisnya tersebut, Kecamatan Juwana sebagian besar dihuni oleh masyarakat yang bermukim di sepanjang pesisir pantai. Meningkatnya aktivitas masyarakat serta kebutuhan mendasar air bersih di wilayah pesisir Kecamatan Juwana, memungkinkan air laut dapat meresap ke dalam air tanah (Muchlis, dkk., 2021). Hal tersebut terbukti dalam data dari Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati (2023) terlihat bahwa Kecamatan Juwana tidak memiliki jumlah produksi air (0 m³), namun jumlah pelanggan air minum di Kecamatan Juwana menjadi jumlah yang paling banyak di Kabupaten Pati, yaitu mencapai 20.235 pelanggan per April 2024, dengan proporsi

19.735 pelanggan domestik (rumah tangga dan hidran umum) dan 460 pelanggan non domestik (industri). Jika jumlah penduduk di Kecamatan Juwana 97.862 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2023) yang tergabung dalam 29.704 kepala keluarga (Dinas Sosial Kabupaten Pati, 2021) maka jumlah rata-rata kepala keluarga berisi 3 anggota keluarga. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipersentasekan akses PDAM di Kecamatan Juwana mencapai 62,03% dari total penduduk. Dari persentase tersebut masih diperlukan berbagai upaya yang dapat meningkatkan secara signifikan akses air minum untuk mencapai SDGs ke-6.

Tambak garam adalah salah satu mata pencaharian yang dipilih oleh penduduk di Kecamatan Juwana. Luas tambak di Kecamatan Juwana menjadi tambak terluas kedua di Kabupaten Pati, setelah Kecamatan Batangan sehingga dalam hal ini, lahan pesisir yang digunakan sebagai penangkal masuknya air laut berubah menjadi tambak garam, yang menyebabkan sumber air di Kecamatan Juwana menjadi asin dan cenderung berwarna (Muchlis, dkk., 2021). Kondisi tersebut menjadikan masyarakat Kecamatan Juwana mengandalkan Perumda Air Minum Tirta Bening untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Tabel 1.2 Tambak Garam di Kecamatan Juwana

No	Desa	Luas Lahan Tambak (Ha)
1	Bakaran Kulon	66,88
2	Langgenharjo	114,63
3	Agungmulyo	161,9
4	Genengmulyo	284,3
Total		657,71

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (dalam TN, 2023).

Desa Genengmulyo menjadi desa dengan tambak produksi paling luas di Kecamatan Juwana. Oleh karena itu, pencemaran air akibat limbah produksi garam tidak dapat dihindarkan. Baik musim kemarau maupun musim hujan, Desa Genengmulyo menjadi desa yang paling sering mengalami kelangkaan air bersih. Hal tersebut diperparah dengan program pemerintah yang belum sepenuhnya menjangkau daerah Kecamatan Juwana sehingga penduduk cenderung mengandalkan air minum kemasan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Apabila tidak memungkinkan menggunakan air minum kemasan, masyarakat akan tetap menggunakan air asin untuk aktivitas sehari-harinya (Suroso, 2016). Kemudahan masyarakat Desa Genengmulyo dalam mengakses air minum layak baru dirasakan saat Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati menjangkau seluruh Kecamatan Juwana. Namun, belum sepenuhnya masyarakat Desa Genengmulyo mengakses layanan Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati. Hingga April 2024, penduduk Desa Genengmulyo yang mengakses layanan Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati masih sebanyak 71,65%.

Tabel 1.3 Jumlah Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati di
Desa Genengmulyo (per April 2024)

Jumlah Penduduk	Jenis Pelanggan			Total Pelanggan
	Domestik		Non Domestik	
	Rumah Tangga	Hidran Umum		
3.366	802	4	25	831

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati, 2024.

Penyediaan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Setiap pihak

yang terlibat berperan sesuai dengan porsinya dan saling bergantung satu sama lain. Pemangku kepentingan dapat dikatakan berperan dengan baik jika melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kedudukannya. Berikut merupakan matriks identifikasi aktor dan perannya dalam penyediaan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

Tabel 1.4 Aktor dalam Penyediaan Kebutuhan Air Minum

No.	Aktor	Peran
1.	Bupati Pati	Pemilik atau penyedia air baku.
2.	Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Sebagai lembaga di bawah Bupati yang mengawasi kinerja Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati.
2.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati	Operator atau pelaksana dalam penyediaan kebutuhan air minum.
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati	Koordinator perencanaan dan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan, serta sebagai fasilitator monitoring dan evaluasi akses air minum di Kabupaten Pati.
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Mitra dalam melaksanakan tugas perencanaan penyediaan air minum dan penyerahan bantuan dari Kementerian PUPR kepada Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati.
6.	Masyarakat Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati	Masyarakat pelanggan yang berkontribusi pada proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam penyediaan kebutuhan air minum.

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber yang diolah, 2024.

Setiap pemangku kepentingan diharapkan mampu menjalin komunikasi yang efektif untuk membangun suatu jaringan yang saling mendukung satu sama lain. Komunikasi bertujuan mendukung peran setiap pemangku kepentingan karena dapat membangun kepercayaan dan pemahaman bersama sehingga diharapkan

dapat mendukung keberhasilan dalam proses kolaborasi. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan penyediaan kebutuhan air minum dengan model *collaborative governance* agar penyediaan kebutuhan air minum dapat dilaksanakan secara optimal.

Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam penyediaan kebutuhan air minum, dan secara mandiri melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penambahan jaringan dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yakni penambahan jaringan dibiayai oleh Perumda Air Minum, serta dapat juga melalui pendanaan secara mandiri oleh masyarakat menggunakan dana hasil patungan bersama atau swadaya. Pendanaan yang dilakukan melalui RKAP, yaitu ketika masyarakat desa ingin menambah jaringan perpipaan air maka perlu membuat surat permohonan penambahan jaringan kepada Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati yang diketahui oleh Pemerintah Desa, selanjutnya Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati melakukan survei dan mempertimbangkan mengusulkan penambahan anggaran perusahaan. Apabila anggaran telah tersedia, pelaksanaan penambahan jaringan dapat dilaksanakan (Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati, 2024).

Proses kolaborasi yang dilakukan antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyediaan air minum di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati masih dikatakan belum optimal karena masih adanya sejumlah permasalahan yang terjadi selama keberjalanan penyediaan kebutuhan air minum. Komunikasi tatap muka di antara para pemangku kepentingan belum

ditentukan jangka waktu yang pasti untuk membahas mengenai proses kolaborasi dalam penyediaan kebutuhan air minum. Komunikasi hanya dilakukan secara *online* melalui grup WhatsApp dan aplikasi Bening Mobile, sebagai bentuk upaya dalam membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan yang terlibat (Utami dan Kardianawati, 2022). Komunikasi tidak dilakukan dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sehingga masih ditemukan hambatan dan tantangan dalam berkoordinasi.

Setelah komunikasi tatap muka dilaksanakan, tahap membangun kepercayaan dimulai. Membangun kepercayaan masih belum optimal karena masih terdapat pembatasan-pembatasan wewenang yang belum jelas yang menimbulkan gesekan kepentingan dalam penyediaan kebutuhan air minum di suatu daerah (Suroso, 2016). Hal ini menyebabkan di antara pemangku kepentingan yang terlibat mengalami rasa ketidakpercayaan satu sama lain.

Dalam membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati berbagi pemahaman prosedur pelayanan dan kerjasama yang telah ditetapkan dalam Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati serta regulasi-regulasi lain yang mengatur mengenai penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan peraturan tersebut, Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati diberi wewenang oleh Dewan Pengawas untuk menjamin kekayaan sesuai dengan regulasi, dengan melakukan pinjaman, mengadakan perjanjian, dan bekerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati. Adanya pemahaman mengenai hal tersebut, diharapkan pemangku kepentingan dapat

memahami batasan-batasan wewenang dan mematuhi proses berkolaborasi yang akan dilaksanakan, namun dalam melaksanakan wewenangnya masing-masing pemangku kepentingan memiliki sifat individual sehingga keterikatan antar pemangku kepentingan belum terbentuk (Maherda, dkk., 2023). Hal ini disebabkan karena kolaborasi penyediaan kebutuhan air minum tidak memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai penegasan anggota dan batasan-batasan wewenangnya sehingga perlu adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan kolaborasi.

Dengan adanya serangkaian proses, kepercayaan, dan pemahaman yang telah terbentuk antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati, dan masyarakat Desa Genengmulyo menghasilkan adanya *collaborative governance* dalam penyediaan kebutuhan air minum dengan tarif, prosedur pelayanan, dan prosedur pelaporan masalah yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan, yang mengharapkan akses layanan air minum layak di Kabupaten Pati dapat mencapai target 100%. Namun dalam hal ini, Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati belum optimal memanfaatkan haknya dalam Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati untuk melibatkan pihak swasta, akademisi, dan komunitas, untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah penyediaan kebutuhan air minum, khususnya di daerah pesisir dengan kandungan garam yang tinggi akibat dari alih fungsi lahan menjadi tambak garam. Hal tersebut disebabkan oleh adanya struktur hierarki, di mana Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati telah berupaya mengajak pihak-pihak eksternal namun terhambat pada kesulitan mendapatkan persetujuan

dari Pemerintah Daerah (Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati, 2024). Akibatnya, pencapaian target terhambat karena kurangnya sumber pendanaan dari pihak-pihak eksternal, khususnya dari perusahaan swasta, dan sampai saat ini pendanaan hanya bersumber dari hasil penjualan air kepada masyarakat.

Dengan melihat berbagai fakta yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat adanya kompleksitas masalah dalam penyediaan air minum. Salah satu yang menjadi sorotan peneliti adalah permasalahan kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pemerintah dengan sektor lain. Temuan pada studi ini akan fokus pada proses kolaboratif yang dilakukan Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati, Pemerintah Kabupaten Pati, serta masyarakat Desa Genengmulyo dalam memenuhi kebutuhan air minum, serta faktor penghambat dalam upaya tersebut. Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik meneliti topik ini dengan judul ***“Collaborative Governance dalam Penyediaan Kebutuhan Air Minum di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan masalah di antaranya:

- 1.2.1 Bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam penyediaan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo?
- 1.2.2 Bagaimana faktor penghambat dalam proses kolaborasi Pemerintah Kabupaten Pati dalam penyediaan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1.3.1 Mengidentifikasi proses kolaborasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pati dalam penyediaan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo.

1.3.2 Mengidentifikasi faktor penghambat dalam proses kolaborasi Pemerintah Kabupaten Pati dalam penyediaan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diuraikan, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu administrasi publik mengenai proses dan faktor penghambat *collaborative governance*, khususnya dalam pengembangan pelaksanaan penyediaan kebutuhan air minum, serta diharapkan bermanfaat untuk kepentingan penelitian di kemudian hari.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan mampu memperluas pengetahuan peneliti, serta diharapkan menjadi masukan bagi mahasiswa Administrasi Publik dalam lingkup pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan Pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang terjadi saat ini maupun di kemudian hari.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian diharapkan menjadi suatu informasi dan referensi, serta menambah pengetahuan lebih jauh mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah penelitian yang telah dilakukan pada masa lalu yang dapat dimanfaatkan sebagai rujukan peneliti untuk memperkaya teori, serta sebagai perbandingan dalam penulisan penelitian ini. Berdasarkan hasil studi kepustakaan, penelitian ini yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penyediaan Kebutuhan Air Minum di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati” memiliki kebaharuan karena belum terdapat penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penelitian ini tidak menduplikasi penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan.

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Oktapiani, Riska, Yusuf Hariyoko, dan Eddy Wahyudi, 2024, Network Governance dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Terowongan Pejalan Kaki Terminal Intermoda Joyoboyo-Kebun Bintang Surabaya, <i>PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik</i> , 4(04), 245-249.	Memahami proses manajemen jaringan untuk memperoleh pasokan dan layanan untuk pembangunan terowongan pejalan kaki yang menghubungkan Terminal Intermoda Joyoboyo dan Kebun Binatang Surabaya.	Penelitian ini menggunakan teori tata kelola jaringan dari Provan dan Kenis (2008), yang menyatakan bahwa model tata kelola jaringan idealnya memiliki 3 unsur, yaitu jumlah aktor, kewenangan setiap aktor, dan tujuan tata kelola jaringan.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Proses pengadaan terowongan pejalan kaki Terminal Intermoda Joyoboyo-Kebun Bintang Surabaya tampaknya berjalan lancar berkat proses tender yang transparan, peningkatan komunikasi antara pemerintah dan non-pemerintah, serta perekrutan pekerja tidak terampil yang melibatkan masyarakat terdampak.
2.	Suyeno, dkk., 2024, <i>Collaborative Water Governance Model for Potable Urban Water Supply in Riau Province, Indonesia</i> , <i>Water Policy</i> , 1-18.	Memahami keberhasilan dan kegagalan keberlanjutan pengelolaan air minum perkotaan di Dumai Kota, Kabupaten Rokan	Penelitian ini menggunakan teori dimensi kolaborasi lintas batas dari Thomson dan Perry (2006), yang meliputi tata kelola, administratif, otonomi organisasi, saling	Penelitian ini menggunakan metodologi <i>soft system</i> , melalui wawancara mendalam, analisis tematik, dan penciptaan tujuan	Penerapan pengelolaan air kolaboratif di wilayah perkotaan dengan pendekatan tata kelola air kolaboratif telah berjalan dengan baik dalam jangka pendek. Namun, hal tersebut belum meningkatkan otonomi organisasi atau

		Hilir, dan Kabupaten Bengkalis melalui kolaborasi lintas sektoral dan menyusun model terbaik yang akan dikembangkan untuk kolaborasi tersebut.	menguntungkan, serta norma kepercayaan dan timbal balik.	model aktivitas dan gambar untuk mengungkap dan mengatasi masalah yang kompleks.	menumbuhkan dimensi kepercayaan dan timbal balik dalam jangka panjang. Selain itu, perlu ditekankan bahwa keberadaan dewan pengawas kolaboratif sangat penting, karena dewan pengawas tersebut yang akan mampu membuka peluang internal dan eksternal.
3.	Abarzua, Gabriela Estefania Bawarshi, dan Johannes Glucker, 2023, <i>Network Governance at the Margin of the State: Rural Drinking Water Communities in Chile, Environmental Management</i> , 71(2), 451-464.	Menentukan struktur tata kelola kolaborasi formal dan informal, serta pola legitimasinya dan menilai sejauh mana karakteristik tertentu dari struktur ini saling berkaitan dengan serangkaian hasil yang diharapkan.	Penelitian ini menggunakan teori efektivitas tata kelola yang dikemukakan oleh Westley, dkk., 2013; Khosravi, dkk., 2019; Hahn, dkk., 2006; Cooper dan Wheeler, 2015; Berdej dan Armitage, 2016; Ulibarri dan Scott, 2017; Ansell dan Gash, 2008, yang menyatakan bahwa efektivitas tata kelola jaringan lateral memiliki lima komponen, yaitu inovasi, SDM yang memiliki pengetahuan/pengalaman,	Penelitian ini menggunakan wawancara kualitatif, observasi partisipan, dan survei jaringan mengenai kolaborasi dan hubungan legitimasi di antara para pemimpin APR lokal.	Ketika APR yang terisolasi membentuk organisasi kolektif, mereka dapat menghasilkan hasil tata kelola yang lebih baik meski tanpa dukungan dari negara. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kolaborasi yang lebih tinggi dan distribusi legitimasi yang lebih integratif dalam hubungan jaringan yang koheren dengan hasil tata kelola yang lebih efektif. Temuan-temuan ini menyarankan penguatan kapasitas sosial dan organisasi tata kelola air di tingkat lokal untuk mengatasi tantangan kekeringan besar dan

			organisasi yang menjembatani, rasa memiliki, dan tujuan bersama		kurangnya infrastruktur publik di wilayah pinggiran perdesaan.
4.	Fajrina, Amaliana Nur, et al., 2023, <i>Collaborative Governance of Narsalis Larvatus</i> (Wurmb, 1787) <i>Conservation in Barito Kuala Regency, Indonesia, Ecological Questions</i> , 34(1), 1-17.	Mendeskripsikan proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan pada konservasi Bekantan di Pulau Curiak	Penelitian ini menggunakan teori prinsip kolaborasi dari Emerson, dkk. (2012) dan Bianchi, dkk. (2021), yang menyatakan bahwa terdapat 3 prinsip dasar kolaborasi yang didasarkan pada kebijakan atau program, yaitu prinsip umum (kesamaan visi, misi, dan tujuan), berbagi motivasi, dan kapasitas aksi.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi, dan tinjauan pustaka pada sejumlah jurnal ternama.	Masyarakat, pemerintah, institusi pendidikan, dan media diajak untuk berpartisipasi dalam tata kelola kolaboratif dalam konservasi bekantan di Pulau Curiak demi menjaga keanekaragaman hayati yang tersisa. Prinsip dan motivasi yang dimiliki bersama meningkatkan populasi bekantan, sedangkan pemahaman dan peran para pelaku dalam konservasi ini membantu menjaga ekosistem dan habitat bekantan, namun kerjasama ini menghadapi tantangan dalam peran pemerintah daerah dan SBI Foundation dalam membangun payung hukum dan jaringan kerjasama. Populasi monyet dan tambahan lahan konservasi seluas 1,2 hektar di kawasan Pulau Curiak memiliki potensi,

					sehingga harus dikembangkan dengan memperkuat strategi komunikasi dan meningkatkan komitmen terhadap prinsip-prinsip bersama. Masyarakat, pemerintah, dan forum lainnya harus dilibatkan dalam pembuatan peraturan, pemantauan, penyelesaian konflik, penggalangan dana, dan alokasi. Hal ini akan mengarahkan kehidupan masyarakat sejalan dengan pelestarian lingkungan dan membantu menilai ketahanan para pelaku dalam beradaptasi terhadap perubahan sekaligus mencapai tujuan.
5.	Phitaloka, Rieke Dwi, dan Sri Wibawani, 2023, <i>Collaborative Governance</i> BUM Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo, <i>PUBLIKAUMA</i> :	Menjelaskan secara rinci bagaimana tata kelola kolaboratif BUM Desa membantu Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.	Penelitian ini menerapkan teori keberhasilan tata kelola kolaboratif Goldsmith dan Kettl (2009) yang menyatakan bahwa ada delapan kriteria keberhasilan tata kelola tersebut, antara lain struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. <i>Purposive sampling</i> dan <i>snowball sampling</i> digunakan untuk mengidentifikasi	Indikator-indikator seperti struktur jaringan, tata kelola, akses terhadap otoritas, akuntabilitas merata, dan akses sumber daya, belum diterapkan secara efektif. SDM Desa “Sukses Bersama” masih kurang dan perlu pelatihan teknik pemasaran untuk promosi produk yang dimiliki

	<i>Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA</i> , 11(1), 8-16.		bersama, kepercayaan peserta, tata kelola, akses terhadap otoritas, akuntabilitas/tanggung jawab distributif, pembagian informasi, dan akses sumber daya.	informan, serta observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.	agar mampu meningkatkan pendapatan BUM Desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan BUM Desa “Sukses Bersama”. Hal inilah yang menjadi kendala utama terwujudnya PADes Sugihwaras. PADes Sugihwaras Kecamatan Candi dan Kabupaten Sidoarjo diwakili oleh pendapatan tersebut.
6.	Islamy, La Ode Syaiful, dan Rininta Andriani, 2022, <i>Proses Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa. <i>Jurnal Administrasi Negara</i> , 28(1), 1-23.	Menjelaskan model tata kelola kolaboratif, yang menekankan interaksi tatap muka, pembangunan kepercayaan, dedikasi proses, saling pengertian, dan hasil antara dalam pengelolaan dana desa.	Penelitian ini menggunakan teori proses kerjasama Ansell dan Gash (2008), yang menggambarkan proses kolaboratif dalam sebuah siklus dengan melibatkan komunikasi tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengambil kesimpulan tersendiri, dengan bantuan analisis data, seperti pengumpulan, reduksi, dan penyajian data.	Komunikasi formal dan informal dapat menumbuhkan rasa saling percaya antar peserta sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Untuk menumbuhkan kerja sama dan saling pengertian antar pelaku yang bekerja sama, perangkat desa dan lapisan masyarakat lainnya memerlukan suatu model bimbingan dan pelatihan terkait pengelolaan dana desa.
7.	Setiawan, Slamet, Soleh Suryadi, dan Iwan Satibi, 2022, <i>Model Collaborative</i>	Mengkaji dan mengevaluasi unsur-unsur yang mempengaruhi	Penelitian ini menggunakan teori efektivitas tata kelola kolaboratif DeSeve	Penelitian ini menggunakan pendekatan	Pelaksanaan KPS dalam penyediaan air minum di Kabupaten Tangerang belum efektif karena struktur jaringan

	<i>Governance Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang, Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan.</i>	efisiensi tata kelola Kerjasama Pemerintah-Swasta Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan PT AETRA untuk penyediaan dan pelayanan air minum.	(2007) yang mengidentifikasi efektivitas tata kelola kolaboratif dengan delapan faktor, antara lain struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, kepercayaan antar aktor, kepastian tata kelola, akses terhadap otoritas, dan akuntabilitas merata, berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya.	deskriptif kualitatif.	yang masih hierarkis, belum adanya kepastian tata kelola, belum meratanya distribusi akuntabilitas dan tanggung jawab, pembagian informasi yang masih terhambat oleh sistem, dan belum memadainya sumber daya manusia maupun keuangan. Penelitian ini mendeskripsikan simulasi tata kelola koperasi pada program KPS Kabupaten Tangerang dalam penyediaan dan pemeliharaan air minum.
8.	Yahya, Hilmy, dan Sudarmo, 2022, <i>Collaborative Governance</i> dalam Program “EPPSON” Sebagai Perwujudan Smart City di Kota Surakarta, <i>Jurnal Mahasiswa Wacana Publik</i> , 2(1), 239-253.	Memahami deskripsi metode kooperatif yang digunakan oleh peserta program "EPPSON", yang menjadi landasan inisiatif penerapan kota pintar di Surakarta.	Penelitian ini menggunakan teori kolaboratif: - Ansell dan Gash (2008). Menurut teori ini, ada empat tahapan kolaborasi, yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. - De Seve, Roberts, Thomas, Perry,	Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan pendekatan deskriptif kualitatif.	Berdasarkan temuan penelitian, kolaborasi berhasil diterapkan sesuai dengan model Ansell dan Gash, dan sebagian besar indikator keberhasilan yang dimodifikasi sesuai dengan De Seve, Roberts, Thomas, Perry, Agranoff, Mc Guire, serta Goldsmith dan Kettle telah berhasil. Meskipun demikian, beberapa matriks masih belum terpenuhi dan memerlukan perbaikan, seperti pembagian informasi di forum.

		Menyadari efektivitas metode pelibatan pemangku kepentingan yang digunakan dalam program "EPPSON", yang menjadi model kota pintar Surakarta.	Agranoff, Mc Guire, dan Goldsmith dan Kettle. Teori ini mengidentifikasi tujuh indikator tata kelola kolaboratif yang efektif, yaitu tujuan bersama, administrasi, kepercayaan, komitmen, mutualitas, berbagi informasi, dan lingkungan.		
9.	Bhattarai, Kiran Kumari, Laxmi Prasad Pant, dan John FitzGibbon, 2020, <i>Contested Governance of Drinking Water Provisioning Services in Nepal's Transboundary River Basins, Ecosystem Services</i> , 45, 101184.	Mengkaji bagaimana tata kelola kolaboratif memungkinkan pendekatan <i>ecosystem services</i> untuk melindungi sumber air sehingga mengatasi permasalahan tata kelola dan proses kebijakan yang kontroversial di wilayah sungai	Penelitian ini menggunakan teori tantangan tata kelola kolaboratif yang dikemukakan oleh Scott dan Thomas (2017), yang menyatakan bahwa sejumlah faktor, termasuk kompleksitas dan ketidakpastian, ruang sosial hierarkis, saling ketergantungan, kepercayaan dan komitmen antar pemangku kepentingan,	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan kunci, lokakarya kebijakan, tinjauan teks kebijakan yang relevan, dan observasi langsung.	Negara membentuk lembaga tata kelola kolaboratif untuk memperbaiki situasi yang sudah buruk, dibandingkan melakukan pengelolaan bersama penyediaan air dan jasa ekosistem lainnya. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif harus fokus pada pemberdayaan masyarakat yang rentan untuk berbicara mewakili diri mereka sendiri dan lingkungan alam, khususnya untuk menjaga keberlanjutan aliran dari

		lintas batas di Nepal tengah.	serta miskomunikasi, kontroversi, dan konflik, menjadi tantangan dalam berkolaborasi.		berbagai <i>ecosystem services</i> untuk generasi saat ini dan masa depan.
10.	Kurniawan, Hendra, dan Donie Tuah Fitriani Putra, 2020, <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Waduk Sei Pulai di Kota Tanjungpinang, <i>Jurnal Widyaiswara Indonesia</i> , 2(1), 1-20.	Mendefinisikan definisi kerjasama menurut Vigoda, menguraikan dan menganalisis proses tata kelola kolaboratif yang digunakan dalam pengelolaan Waduk Sei Pulai.	Penelitian ini menggunakan teori proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Vigoda (2002), yaitu memutuskan isu yang cocok untuk kolaborasi, menentukan karakteristik isu, mencari pihak yang terlibat, mencari tahu bagaimana penerapannya, mencari tahu seperti apa penyelenggaraannya, dan mencari tahu bagaimana evaluasi proses.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi dengan strategi triangulasi.	Berdasarkan temuan penelitian, pengelolaan Waduk Sei Pulai memiliki kapasitas organisasi, SDM dan keuangan, serta jaringan yang kurang memadai. Meski banyak pihak yang ikut serta, namun pola kemitraan belum mampu membawa perubahan besar dalam penyelesaian permasalahan pengelolaan waduk. Penelitian ini memberikan saran agar Matriks Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Riau direvisi dengan mengutamakan program, serta pemangku kepentingan yang bertugas mengelola Sei Pulai. Reservoir, mengakomodasi pihak-pihak yang mempunyai kapasitas, dan menyusun SOP

					untuk memperkuat kolaborasi pemangku kepentingan.
11.	Nurjaya, Muhammad, dkk., 2020, <i>The Mobilization of Shared Principles in The Community Based Drinking Water Supply and Sanitation (PAMSIMAS) in The Perspective of The Collaborative Governance Regim (CGR) in Maros Regency, European Journal of Research in Social Sciences</i> , 8(2), 27-38.	Mendesripsikan pelaksanaan proses kolaborasi antar aktor dengan menggunakan prinsip bersama dalam penyelenggaraan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Maros yang memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan program PAMSIMAS dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak dan secara berkelanjutan.	Penelitian ini menggunakan teori <i>Collaborative Governance Regime</i> (CGR) yang dikemukakan oleh Kirk Emerson, Stefan Balogh, dan Tina Nabachi (2012), yaitu keterbukaan, definisi, musyawarah dan penetapan.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan tingkat analisis eksplanatori.	Dalam hal keterbukaan, kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan PAMSIMAS di Kabupaten Maros untuk menyampaikan secara gamblang dan jelas apa keinginan dan kepentingannya masih sangat sulit dilakukan. Masyarakat umum belum memiliki keberanian, apalagi untuk disampaikan dalam forum/pertemuan resmi. Dalam proses pendefinisian, keaktifan masyarakat untuk saling berdiskusi guna menguraikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyediaan air minum dan sanitasi yang layak belum terlaksana secara optimal. Dalam proses musyawarah, pemahaman dan implementasi nilai-nilai sosial yang menjadi modal sosial semakin terabaikan dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan program

					PAMSIMAS, nilai-nilai kesukarelaan, kejujuran untuk saling menghargai dan menghormati semakin terkikis oleh pandangan yang semakin pragmatis dan hedonistik, gotong royong rasa kebersamaan semakin teruji. Dalam penetapan, tahapan pelaksanaan program PAMSIMAS dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis. Sebaiknya pertemuan disesuaikan untuk dilaksanakan di sela-sela waktu kesibukan masyarakat, terutama waktu yang berbarengan dengan kegiatan rutin masyarakat. Pertemuan tidak harus dilaksanakan pada pagi atau siang hari tetapi dapat dilaksanakan malam hari setelah shalat Isya dan tempatnya pun dapat dilaksanakan di tempat yang sama.
12.	Oktaviani, Putri Permata, Entang	Mengetahui dan mengevaluasi	Penelitian ini menggunakan teori	Penelitian dilaksanakan	Potensi Kemitraan Pemerintah Swasta yang belum terealisasi,

	Adhy Muhtar, dan Nina Karlina, 2020, <i>Public-Private Partnership in Water Supply of DKI Jakarta</i> , Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, IV(1).	bagaimana PAM Jaya dan mitra swasta menerapkan kemitraan pemerintah-swasta untuk menyediakan air bersih bagi DKI Jakarta.	penggunaan kemitraan publik-swasta (<i>public-private partnership</i>) yang dikemukakan oleh Emanuel Savas (2000), yang mencakup peran dan fungsi, persaingan, regulasi, risiko, pengadaan, dan pendanaan.	dengan menggunakan metode penelitian kualitatif	penerapannya di DKI Jakarta untuk menyediakan air bersih belum berhasil. KPS tidak mencerminkan kepentingan umum karena tidak ada proses pengadaan atau persaingan antar mitra, dan tidak disebutkan peraturannya. Ketidakpastian pembagian risiko dan tunjangan bagi mitra lebih merugikan PAM Jaya dan berujung pada defisit. Peran dan fungsi PAM Jaya dan mitra swasta tidak dilaksanakan. Peneliti berpesan agar Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan undang-undang yang tegas dan jelas, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan berhenti menggunakan bentuk kolaborasi berbasis konsesi dalam perjanjian kerja sama.
13.	Syahputra, Kurnia Alvin, dan Muhammad Farid Ma'ruf, 2020, <i>Collaborative Governance</i> dalam	Memberikan contoh penggunaan <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan pariwisata di Pantai	Penelitian ini menggunakan teori proses <i>collaborative governance</i> yang dikembangkan oleh More dan Stephens (2012), meliputi tahap	Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui pendekatan	Penilaian berguna untuk melakukan kolaborasi dengan melihat keadaan awal di mana terdapat disfungsional antar pemangku kepentingan sehingga menghambat proses

	Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Studi pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perum Perhutani Kabupaten Blitar, dan Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar), <i>Publika</i>, 8(4).	Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.	evaluasi, delegasi, pelaksanaan.	inisiasi, dan wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka. Analisis data dilakukan berdasarkan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:337), yaitu melalui prosedur analisis data, yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.	pengelolaan. Pemerintah kabupaten memulai program ini sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Tujuan delegasi adalah untuk membangun saling pengetahuan tentang hak dan kewajiban serta fungsi pemangku kepentingan dalam membina kolaborasi. Perubahan fasilitas, layanan komersial, kemampuan sumber daya manusia, dan pemangku kepentingan yang menyadari peran dan tanggung jawab utama yang berbeda terjadi selama implementasi di destinasi pariwisata.
14.	Woldesenbet, Wassihun Gebreegiziaber, 2020, <i>Analyzing Multi-pemangku kepentingan Collaborative Governance Practices in Urban Water Projects in Addis Ababa City</i>:	Menganalisis proses dan hasil dari struktur kolaborasi multi-pemangku kepentingan pada tata kelola proyek air perkotaan, dan mengembangkan jalur potensial untuk membangun kolaborasi di antara	Penelitian ini menggunakan gabungan dari beberapa teori <i>collaborative governance</i>, oleh Ansell dan Gash (2007); Emerson, dkk. (2011); dan Bryson dkk. (2015), yang memunculkan elemen-elemen aktivitas tata kelola kolaboratif,	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori. Pengumpulan data dilakukan melalui data statistik dan empiris bersumber dari berbagai	Proses dialog multi pemangku kepentingan terhambat oleh tidak adanya prasejarah kolaborasi, komunikasi pramusyawarah yang asimetris, dan representasi pemangku kepentingan oleh individu yang tidak memiliki pengalaman atau keahlian yang dibutuhkan, dan kurangnya kemauan di antara para pemangku kepentingan

	<i>Procedures, Priorities, and Structures, Applied Water Science, 10(1).</i>	para pemangku kepentingan untuk tata kelola badan air	yaitu komunikasi dua arah, proses musyawarah tatap muka, prasejarah kolaborasi, desain kelembagaan, membangun kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, legitimasi, serta tindakan, keberlanjutan, dan adaptasi.	dokumen serta melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus.	untuk terlibat dalam proses dialog. Kegiatan pengawasan, evaluasi, program penilaian sungai, dan pembentukan kerangka tata kelola yang stabil dan aman dibebankan pada beberapa sektor pemerintah, yang menyebabkan munculnya berbagai masalah. Di sisi lain, jalur potensial untuk membangun kolaborasi yang kuat di antara para pemangku kepentingan memerlukan prosedur sistematis yang membangun kesamaan hukum, politik, dan administratif di antara para pemangku kepentingan. Panduan ini untuk menanamkan tanggung jawab, kepemilikan, dan komitmen pada para pemimpin, direktur, dan pakar untuk bekerja sama dengan orang lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah air perkotaan tidak dapat ditangani dengan baik kecuali struktur tata kelola dibangun terlebih dahulu dengan
--	--	---	--	--	--

					membuat proses pra-musyawarah dan musyawarah yang menggabungkan prinsip-prinsip kesederhanaan, komunikasi simetris dengan semua pemangku kepentingan, penunjukan para ahli, dan pengembangan sistem kolaborasi yang teratur. Lebih jauh, ini akan memungkinkan untuk mengatur proyek tata kelola air secara efektif dengan menggabungkan perspektif ekologis, sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu, mempertimbangkan konteks budaya, hukum, sosial, dan politik dan membentuk komite yang peka terhadap individu dan organisasi di berbagai tingkatan sangat penting untuk keberlanjutan dan kemampuan beradaptasi.
15.	Rahmaningtyas, I., dan A.Y.S. Rahayu, 2019, <i>Collaborative Governance in Providing Facilities</i>	Mengetahui tentang tata kelola kolaboratif yang digunakan oleh sektor publik dan	Penelitian ini menggunakan teori model <i>collaborative governance</i> yang dikemukakan oleh Emerson dan Nabatchi	Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan berlandaskan teori	Tata kelola kolaboratif dalam Penyediaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kota Jakarta Utara terdapat dinamika kolaborasi yang saling

	<i>of Sungai Bambu Child Friendly Integrated Public Space, North Jakarta City, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 328(1).</i>	swasta untuk menyediakan fasilitas RPTRA di Sungai Bambu, Kota Jakarta Utara.	(2015). Menurut teori ini, konsep keterlibatan, motivasi bersama, kemampuan bertindak bersama, dan konteks sistem merupakan elemen kunci dalam interaksi dinamis kolaboratif.	<i>collaborative governance</i> yang dikemukakan oleh Emerson dan Nabatchi (2015), dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi.	menguatkan dan mempunyai hubungan timbal balik. Hal ini terlihat dari indikator dinamika kolaboratif, seperti motivasi bersama, kemampuan bertindak kooperatif, dan keterlibatan yang berprinsip, yang semuanya saling berhubungan dan berdampak satu sama lain. Di antara komponen-komponen yang belum tercapai secara sempurna, salah satunya adalah pada motivasi bersama karena banyaknya pihak yang terlibat sehingga terjadi ketimpangan pemahaman antar pelaku kolaborasi. Pada bagian “<i>capacity for joint action</i>” juga, distribusi pengetahuan sulit dilakukan karena banyaknya tingkat pemerintahan dan luasnya pihak yang berkolaborasi. Keberlanjutan dinamika kolaborasi tidak terlepas dari konteks sistem yang menggagasnya. Emerson dan Nabatchi menyatakan bahwa semakin banyak faktor
--	---	--	--	--	--

					konteks sistem yang muncul, maka dapat memengaruhi dan dapat memperkuat keberhasilan implementasi dinamika kolaborasi itu sendiri. Dalam kolaborasi ini, lima dari enam faktor dimasukkan. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa bentuk-bentuk dinamika kolaborasi juga dapat memengaruhi konteks sistem.
--	--	--	--	--	--

Sumber: Literatur Peneliti

Perbedaan penelitian “*Collaborative Governance* dalam Penyediaan Kebutuhan Air Minum di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati” dengan penelitian terdahulu dilakukan untuk menjelaskan bahwa penelitian ini tidak meniru penelitian sebelumnya. Berikut adalah perbedaan penelitian terdahulu yang termuat dalam jurnal-jurnal.

Penelitian pertama dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Riska Oktapiani, Yusuf Hariyoko, dan Eddy Wahyudhi (2024) dengan judul penelitian “*Network Governance* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Terowongan Pejalan Kaki Terminal Intermoda Joyoboyo-Kebun Bintang Surabaya”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokus, teori yang digunakan, serta hasil yang dicapai dalam melakukan penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian, serta membantu dalam membuat saran dan rekomendasi penelitian.

Penelitian kedua dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Suyeno, dkk. (2024) dengan judul penelitian “*Collaborative Water Governance Model for Potable Urban Water Supply in Riau Province, Indonesia*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokus, teori yang dipakai, serta hasil yang dicapai dalam melakukan penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian, serta membantu dalam membuat saran dan rekomendasi penelitian.

Penelitian ketiga dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Gabriela Estefania Bawarshi Abarzua dan Johannes Glucker (2023) dengan judul penelitian *“Network Governance at the Margin of the State: Rural Drinking Water Communities in Chile”*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokus, teori yang digunakan, serta hasil penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian, serta membantu dalam membuat saran dan rekomendasi penelitian.

Penelitian keempat dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Amaliana Nur Fajrina, dkk. (2023) dengan judul penelitian *“Collaborative Governance of Narsalis Larvatus (Wurmb, 1787) Conservation in Barito Kuala Regency, Indonesia”*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokus, teori yang dipakai, serta hasil penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian, serta membantu dalam membuat saran dan rekomendasi penelitian.

Penelitian kelima dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rieke Dwi Pitaloka dan Sri Wibawani (2023) dengan judul penelitian *“Collaborative Governance BUM Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo”*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokus, teori yang dipakai, serta hasil yang dicapai dalam melakukan penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu dengan penelitian yang

dilakukan peneliti yaitu dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian, serta membantu dalam membuat saran dan rekomendasi penelitian.

Penelitian keenam dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani (2022) dengan judul penelitian “Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu lokus serta hasil yang dicapai dalam melakukan penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dijadikan sebagai gambaran umum dalam melaksanakan penelitian, serta memberikan gambaran hasil penelitian karena menggunakan teori yang sama.

Penelitian ketujuh dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Slamet Setiawan, Soleh Suryadi, dan Iwan Satibi (2022) dengan judul penelitian “Model *Collaborative Governance* Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada lokus, teori yang dipakai, serta hasil yang dicapai dalam melakukan penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian, serta membantu dalam membuat saran dan rekomendasi penelitian.

Penelitian kedelapan dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Hilmy Yahya dan Sudarmo (2022) dengan judul penelitian “*Collaborative Governance* dalam Program “EPPSON” Sebagai Perwujudan Smart City di Kota Surakarta”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada lokus, teori yang dipakai, serta hasil penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu ini dengan

penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian, serta membantu dalam membuat saran dan rekomendasi penelitian.

Penelitian kesembilan dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Kiran Kumari Bhattarai, Laxmi Prasad Pant, dan John FitzGibbon (2020) dengan judul penelitian “*Contested Governance of Drinking Water Provisioning Services in Nepal’s Transboundary River Basins*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokus, teori yang dipakai, serta hasil penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian, serta membantu dalam membuat saran dan rekomendasi penelitian.

Penelitian kesepuluh dari penelitian terdahulu yang ditulis Kurniawan Hendra dan Donie Tuah Fitriani Putra (2020) dengan judul penelitian “*Collaborative Governance dalam Pengelolaan Waduk Sei Pulai di Kota Tanjungpinang*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokus, teori yang dipakai, serta hasil penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian, serta membantu dalam membuat saran dan rekomendasi penelitian.

Penelitian kesebelas dari penelitian terdahulu yang ditulis Kurniawan Muhammad Nurjaya, dkk. (2020) dengan judul penelitian “*The Mobilization of Shared Principles in The Community Based Drinking Water Supply and Sanitation (PAMSIMAS) in The Perspective of The Collaborative Governance Regim (CGR)*”

in Maros Regency”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada lokus, teori yang dipakai, serta hasil yang dicapai dalam melakukan penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian, serta membantu dalam membuat saran dan rekomendasi penelitian.

Penelitian kedua belas dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Putri Permata Oktaviani, Entang Adhy Muhtar, dan Nina Karlina (2020) dengan judul penelitian “*Public-Private Partnership in Water Supply of DKI Jakarta*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada lokus, teori yang dipakai, serta hasil yang dicapai dalam melakukan penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian, serta membantu dalam membuat saran dan rekomendasi penelitian.

Penelitian ketiga belas dari penelitian terdahulu yang ditulis Kurnia Alvin Syahputra dan Muhammad Farid Ma’ruf (2020) dengan judul penelitian “*Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Studi pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perum Perhutani Kabupaten Blitar, dan Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar)*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokus, teori yang dipakai, serta hasil penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian, serta membantu dalam membuat saran dan rekomendasi penelitian.

Penelitian keempat belas dari penelitian terdahulu yang ditulis Wassihun Gebreegiziaber Woldesenbet (2020) dengan judul penelitian “*Analyzing Multi-pemangku kepentingan Collaborative Governance Practices in Urban Water Projects in Addis Ababa City: Procedures, Priorities, and Structures*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokus, teori yang dipakai, serta hasil penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian, serta membantu dalam membuat saran dan rekomendasi penelitian.

Penelitian kelima belas dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh I. Rahmaningtyas dan A.Y.S. Rahayu (2019) dengan judul penelitian “*Collaborative Governance in Providing Facilities of Sungai Bambu Child Friendly Integrated Public Space, North Jakarta City*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti terletak pada lokus, teori yang dipakai, serta hasil penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian, serta membantu dalam membuat saran dan rekomendasi penelitian.

1.5.2 Kajian Teori

1.5.2.1 Administrasi Publik

Menurut Nigro dan Nigro (dalam Syafri, 2012), administrasi publik adalah suatu jenis kerja sama yang dilakukan oleh suatu kelompok, termasuk mereka yang menjadi bagian dari pemerintahan, yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan berbagai lembaga yang terkait dengan kedua organisasi tersebut karena merupakan

komponen fundamental politik, administrasi publik memainkan peran penting dalam penciptaan kebijakan pemerintah. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kelompok yang dimaksud, yaitu bekerjasama dengan berbagai organisasi swasta dan pihak lain. Menurut Nigro dan Nigro, penekanan dalam administrasi publik harus pada kolaborasi dua orang atau lebih bila digunakan dalam konteks pemerintahan dan berbeda dengan administrasi individual.

Administrasi publik menurut Woodrow Wilson (dalam Dwiyanto, 2022) merupakan penerapan hukum yang rinci dan sistematis, dapat berupa kebijakan, praktik, aturan dan regulasi, dan lain-lain dalam suatu tindakan. Administrasi publik mencakup bidang-bidang berikut (Nicholas Henry dalam Keban, 2014):

1. Organisasi publik, yang mengandalkan berbagai gaya organisasi dan kecenderungan birokrasi.
2. Manajemen publik, berkaitan dengan proses serta keahlian terkait manajemen, mengevaluasi pelaksanaan program dan tingkat produktivitas, serta dana yang harus dialokasikan untuk melayani kepentingan publik dan pengelolaan sumber daya manusia yang tersedia.
3. Implementasi, yang mencakup upaya pengubahan milik publik menjadi milik pribadi, administrasi yang digunakan antar pemerintah, dan perilaku etis dalam birokrasi.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa ahli tersebut, administrasi publik memiliki ruang lingkup yang berkaitan dengan segala sesuatu mengenai kepentingan publik yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama dari berbagai kelompok atau organisasi, baik dari sektor pemerintahan maupun dari

sektor privat, serta dengan masyarakat dalam melaksanakan suatu program yang bertujuan untuk kesejahteraan publik. Hasil yang diharapkan dari adanya kerjasama antar sektor adalah terbentuknya kebijakan, aturan, dan regulasi yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan suatu tindakan sehingga penelitian ini termasuk dalam fokus manajemen publik karena di dalamnya membahas mengenai bagaimana proses dan pengelolaan kolaborasi yang dilakukan pemerintah.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah penjelasan konsep-konsep yang digunakan oleh para profesional untuk menunjukkan kondisi perkembangan sudut pandang keilmuan untuk memahami peristiwa sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Nicholas Henry (dalam Ikeanyibe, dkk., 2017) mengidentifikasi enam model administrasi publik, yaitu:

Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi yang ada pada tahun 1900-1926 merupakan paradigma pertama. Frank J. Goodnow dan Leonard D. White adalah pemain kuncinya. Penerapan perspektif administrasi publik merupakan suatu nilai yang bebas dan ditujukan pada tujuan efisiensi ekonomi birokrasi pemerintahan, seperti yang dijelaskan oleh Goodnow dalam karyanya "*Politics and Participation*". Permasalahan paradigma ini adalah hanya menekankan pada lokus, yaitu birokrasi pemerintahan sehingga tidak memberikan penjelasan rinci mengenai proses pembangunan.

Paradigma Prinsip Administrasi merupakan paradigma kedua yang berlangsung pada tahun 1927-1937. Dalam paradigma ini, Willoughby, Gullick, dan Urwick adalah tokoh utamanya. Konsep universal Perencanaan, Pengorganisasian,

Kepegawaian, Pengarahan, Koordinasi, Pelaporan dan Penganggaran (POSDCORB) digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip administrasi dalam paradigma ini.

Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik berlangsung pada 1950-1970 merupakan paradigma ketiga. Saat mengedit buku "*Elements of Public Administration*" pada tahun 1946, Morstein-Marx mengajukan pertanyaan bahwa tidak mungkin memisahkan politik dari administrasi. Herbert Simon juga menyuarakan penolakan terhadap modifikasi prinsip-prinsip administratif yang menjadikannya tidak lagi dianggap sebagai standar universal. Defisit ruang lingkup administrasi publik bermula dari prinsip-prinsip administrasi publik yang kehilangan jati diri dan menimbulkan ketidakdisiplinan kedua belah pihak. Fokus abstrak administrasi publik yang dihasilkan dari dominasi disiplin politik dengan prinsip-prinsip administrasi mengungkapkan eratnya hubungan antara administrasi publik dan politik. Akibatnya, birokrasi pemerintah menjadi titik fokus dalam paradigma ini.

Ilmu Administrasi merupakan paradigma keempat yang ada sejak tahun 1956-1970. Hanya prinsip-prinsip mapan yang dikembangkan dengan menggunakan paradigma ini. Paradigma ini memberikan penekanan khusus pada analisis manajemen, perilaku organisasi, dan penggunaan alat-alat mutakhir termasuk riset operasi, analisis sistem, dan metodologi kuantitatif. Evolusi paradigma ini mempunyai dua arah utama, yaitu kemajuan di bidang ilmu administrasi murni yang didukung oleh kajian psikologi sosial, dan kemajuan di bidang kebijakan publik karena dapat diarahkan pada parameter administrasi publik

yang menjadikan lokusnya abstrak maka penekanan yang dikembangkan dapat dikatakan fleksibel.

Paradigma kelima, yang mencakup tahun 1970-sekarang, disebut paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara yang mempunyai fokus dan lokus berbeda. Paradigma ini berpusat pada kebijakan publik, teori manajemen, dan teori organisasi. Fokusnya saat ini adalah pada isu dan kepentingan kemasyarakatan. Ketepatan fokus dan lokusnya membedakan paradigma ini dengan sejumlah paradigma sebelumnya.

Paradigma *governance* merupakan paradigma keenam yang dimulai sejak tahun 1990 hingga saat ini. Paradigma tersebut bergerak ke arah *good governance* dengan adanya pergeseran dari *government* ke *governance* yang menjelaskan integrasi stabilitas pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam mencapai tujuan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, negara perlu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, sesuai paradigma pemerintahan.

Penelitian ini menganut pada paradigma ke enam, yaitu *governance* karena membahas mengenai *collaborative governance*, baik kolaborasi antar pemerintah maupun non-pemerintah, serta berbasis pada partisipasi masyarakat. Paradigma *governance* sesuai dengan penelitian ini mengingat eksistensi dari *good governance* yang masih menjadi tren di Indonesia untuk mewujudkan suatu program atau kebijakan yang pro terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat, di mana kepentingan dan kebutuhan masyarakat tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri oleh pemerintah sehingga perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak.

1.5.2.3 Manajemen Publik

Menurut Stoner (dalam Wijaya, 2014), manajemen adalah proses mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi upaya individu di dalam organisasi untuk menggunakan sumber daya organisasi guna mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Ott, Hyde, dan Shafritz (dalam Wijaya, 2014), manajemen publik yaitu sub bidang administrasi publik yang membahas ilmu di balik rencana program, pengubahan struktur organisasi, dan penyebaran sumber daya melalui sistem manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, sistem penganggaran, serta sistem manajemen publik, seperti evaluasi dan audit program.

Manajemen publik menurut Lynn (dalam Wijaya, 2014), dapat dipertimbangkan dalam tiga kemungkinan, yaitu manajemen publik sebagai seni, sebagai ilmu, dan sebagai profesi.

1. Manajemen publik sebagai seni (*art*), secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang beragam dan kreatif yang dilaksanakan oleh praktisi sehingga tidak dapat dipelajari dengan cara “dihitung”. Hal tersebut memiliki arti manajemen publik sebagai sebuah aktivitas dengan tingkat fleksibilitas tinggi dan menyesuaikan situasi dan kondisi dalam melakukan setiap aktivitas.
2. Manajemen publik sebagai ilmu (*science*), secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu analisis sistematis yang menggunakan interpretasi dan eksplanasi dalam melakukan analisis manajemen publik.
3. Manajemen publik sebagai profesi (*profession*), secara umum dapat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang berkomitmen untuk mengabdikan dirinya kepada ilmu yang berkaitan dengan manajemen publik.

Menurut pandangan para ahli yang telah dijelaskan di atas, manajemen publik dapat disimpulkan sebagai pemanfaatan fungsi-fungsi manajemen, baik secara individu maupun kolektif, melalui pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Akibat beragamnya perubahan dan daya cipta dalam penerapannya, pengelolaan publik dalam situasi ini dapat dikatakan mempunyai jangkauan yang luas.

1.5.2.4 Collaborative Governance

Menurut Deseve (2007), *collaborative governance* adalah sistem terpadu dan serangkaian interaksi yang dikendalikan oleh organisasi lintas sektor, baik organisasi formal maupun non-formal, dengan prinsip-prinsip organisasi yang dimodifikasi dan definisi keberhasilan yang berbeda. Menurut teori ini, terdapat delapan faktor penting untuk mengukur efektivitas tata kelola kolaboratif, antara lain:

1. Struktur jaringan, yang merupakan gambaran konseptual kesatuan hubungan antara dua institusi sebagai cara untuk mencerminkan komponen fisik sebenarnya dari jaringan atau kolaborasi yang akan digunakan.
2. Komitmen terhadap tujuan bersama, diperlukan untuk mencapai tujuan bersama agar kolaborasi dapat berfungsi secara efektif karena tindakan kerjasama ini mengharuskan pemangku kepentingan untuk memahami konsep dasar organisasi, yaitu niat dan komitmen maka tingkat efektivitas dan efisiensi dalam kolaborasi dapat mencapai tingkat yang lebih baik dengan adanya komitmen.

3. Kepercayaan antar partisipan, yang didasarkan adanya ikatan sosial atau profesional, yaitu keyakinan para pemangku kepentingan terhadap informasi atau tindakan yang dikomunikasikan oleh pemangku kepentingan lainnya dalam jaringan untuk mencapai tujuan bersama.
4. Kejelasan tata kelola, di mana menurut pandangan ini tata pemerintahan yang baik memerlukan transparansi, yang meliputi:
 - a. Batasan dan eksklusivitas: penekanan siapa saja anggota dan bukan anggota.
 - b. Aturan: pembatasan perilaku pemangku kepentingan dalam berkolaborasi.
 - c. Penentuan nasib sendiri: kebebasan untuk memilih siapa yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan proses kolaboratif dan bagaimana hal itu akan dilakukan.
 - d. Manajemen jejaring: penyelesaian konflik mengenai alokasi sumber daya, jaminan kualitas, dan pemeliharaan organisasi sehingga terdapat aturan dasar yang dapat diterima bersama untuk kerja sama.
5. Akses terhadap otoritas, yaitu tersedianya standar atau langkah-langkah pelaksanaan prosedur yang dapat dipahami dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.
6. Akuntabilitas/responsibilitas distributif, yang berkaitan dengan gagasan *shared governance*. Tata kelola bersama mencakup penataan, pengelolaan, pengelolaan yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, serta berbagi pengambilan keputusan dengan seluruh kolaborator. Hal ini akan

memungkinkan adanya distribusi beban yang adil untuk mencapai hasil yang diharapkan.

7. Pembagian informasi, yang mengacu pada pemberian kemudahan akses kepada pemangku kepentingan terhadap informasi, perlindungan privasi atau kerahasiaan informasi pribadi pemangku kepentingan, dan pembatasan akses bagi pemangku kepentingan lainnya sepanjang dapat disepakati semua pihak.
8. Akses sumber daya, mengacu pada tersedianya sumber daya, termasuk SDM, teknologi, keuangan, dan lainnya yang diperlukan dalam mewujudkan tujuan kolaborasi.

Ansell dan Gash (2008) mengartikan *collaborative governance* adalah jenis pemerintahan di mana lembaga-lembaga publik menggunakan kesepakatan dan konsensus untuk merancang atau melaksanakan kebijakan, program, dan aset publik dengan melibatkan pemangku kepentingan dari luar pemerintah dalam pengambilan keputusan formal. Definisi ini menekankan enam syarat krusial dalam kolaborasi, antara lain: (1) forum dikuasai pemerintah; (2) peserta forum berisi pemerintah dan non pemerintah; (3) peserta ikut mengambil keputusan, bukan sekedar “konsultasi” dengan pihak yang berwenang; (4) forum dilaksanakan secara formal dan interaktif dalam suasana kelompok; (5) forum berupaya mencapai konsensus; serta (6) fokus kolaborasi berkaitan dengan kebijakan publik atau isu lainnya. Model *collaborative governance* ini mempunyai empat fenomena, yaitu:

1. Kondisi awal, menurut teori ini ada tiga faktor utama yang dapat membantu atau menghambat kerja sama pemangku kepentingan, yaitu kesenjangan

sumber daya atau kekuatan antara berbagai pihak yang terlibat, insentif untuk berkolaborasi di antara pihak-pihak tersebut, dan sejarah konflik.

2. Pemimpin yang fasilitatif, menurut teori ini jika terdapat perbedaan pendapat yang besar dan kepercayaan yang buruk, namun keseimbangan kekuatan cukup seimbang dan para pemangku kepentingan mempunyai motivasi untuk berpartisipasi maka kolaborasi dapat berhasil jika bergantung pada kepemimpinan yang cakap dari masing-masing pemangku kepentingan.
3. Desain kelembagaan, mengacu pada pedoman dan prosedur mendasar yang harus diikuti ketika berkolaborasi karena hal tersebut sangat penting untuk validitas prosedur proses kolaboratif. Inti masalah dalam desain kelembagaan adalah akses terhadap proses kolaboratif itu sendiri.
4. Proses kolaborasi, merupakan siklus yang mudah menurut teori ini, namun penting untuk mempertimbangkan apakah masukan yang diberikan di awal kolaborasi dapat berdampak positif atau negatif pada kolaborasi berikutnya. Menurut teori ini, proses kolaboratif terdiri dari lima tahap, antara lain:
 - a. Komunikasi tatap muka, merupakan pertemuan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa eksplorasi potensi manfaat tidak berakhir pada pertemuan awal. Meskipun komunikasi tatap muka dapat memperburuk kesenjangan status, prasangka, dan rasa saling menghina, mustahil membayangkan kolaborasi yang produktif tanpa hal tersebut.
 - b. Membangun kepercayaan, berkaitan dengan pemimpin kolaboratif yang kuat harus memahami bahwa mengembangkan kepercayaan di antara pemangku kepentingan adalah untuk menghindari risiko manipulasi.

Mengembangkan kepercayaan tidak berarti bahwa komunikasi dan negosiasi mengenai isu-isu substantif dilakukan dalam fase yang terpisah. Membangun kepercayaan merupakan sebuah pertemuan yang benar-benar memiliki tujuan akhir untuk mencapai keberhasilan, melalui ketersediaan informasi yang relevan dan aktual, serta pemberian kepercayaan pada setiap pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

- c. Kepatuhan terhadap proses, merupakan komitmen untuk menerapkan prosedur kooperatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Masing-masing pihak mengambil inisiatif untuk memenuhi perannya dalam menjalankan proses kolaborasi. Setiap pemangku kepentingan bertanggung jawab dan sadar akan tanggung jawab mereka. Pemangku kepentingan dalam situasi ini harus terus menerus dan aktif berpartisipasi dalam seluruh proses pengambilan keputusan.
- d. Berbagi pemahaman, yaitu suatu pendekatan untuk menentukan seberapa besar pembelajaran kolektif dihasilkan melalui kerjasama dan dapat dianggap bagian dari proses kolaboratif yang lebih besar. Mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang mendasari kerja sama yang dilakukan secara bersama-sama, mengenali permasalahan sehingga pemangku kepentingan mempunyai pemahaman bersama, dan saling berbagi pemahaman serta pemahaman bahwa kolaborasi adalah milik bersama dan tugas bersama.
- e. Keluaran sementara, penting untuk menciptakan momen yang dapat menghasilkan kolaborasi yang berhasil dipandang sebagai hasil antara.

Pencapaian kecil ini dapat berkontribusi pada proses kolaboratif, mendorong siklus yang bermanfaat dalam meningkatkan kepercayaan dan dedikasi.

Untuk melaksanakan tujuan yang luas, maka *collaborative governance* menurut Emerson, dkk. (2012), yakni suatu tahapan serta struktur dalam mengambil keputusan pada kebijakan yang melibatkan masyarakat secara positif pada semua organisasi publik, komunitas, privat, dan masyarakat sipil. Formulasi ini memungkinkan perbedaan antara beragam aplikasi, kelas, dan pertimbangan serta memfasilitasi penggunaan tata kelola kolaboratif sebagai konstruksi analitis yang lebih umum untuk administrasi publik. Model tata kelola kolaboratif ini terdiri dari lima bagian, yaitu:

1. Konteks sistem, yang dalam teori ini bukanlah daftar kondisi awal melainkan ruang tiga dimensi kondisi dari luar yang memengaruhi dinamika dan kualitas kolaborasi pada titik mana pun sepanjang masa. Proses berpotensi membuka peluang baru atau menciptakan tantangan dan kesulitan yang tidak terduga.
2. Faktor pendorong (*drivers*), yang dalam pendekatan ini membedakan faktor kontekstual dengan kekuatan pendorong utama dan tanpa faktor tersebut maka kolaborasi akan gagal. Kepemimpinan, insentif konsekuensial, ketergantungan, dan ketidakpastian adalah beberapa variabel yang memotivasi ini.
3. Dinamika kolaboratif, berfokus pada tiga elemen yang berhubungan satu sama lain, yaitu motivasi bersama, kemampuan bertindak kooperatif, serta

keterlibatan yang berprinsip. Teori ini melihat tahapan dalam dinamika kolaboratif sebagai interaksi berulang yang bersiklus.

4. Aksi, dalam teori ini tindakan kerjasama menjadi inti dari setiap tahapan tata kelola kolaboratif, proses dan hasil tidak dapat dipisahkan dengan jelas dalam *collaborative governance* karena proses itu sendiri penting dan kemungkinan besar saling berkaitan.
5. *Outcome*, dalam teori ini terdiri dari *impact* dan *adaptation*. *Impact*, yaitu perubahan terhadap kondisi yang ada atau yang diantisipasi atau memerlukan perubahan, sedangkan *adaptation* terjadi secara langsung sebagai respons terhadap efektivitas tindakan dan dampak yang dirasakan dari tata kelola kolaboratif, atau secara tidak langsung sebagai akibat perubahan konteks sistem.

Berdasarkan pada teori *collaborative governance* yang telah disebutkan, disimpulkan bahwa kolaborasi adalah sebuah bentuk kerjasama berbagai aktor yang berkepentingan, baik dari organisasi publik, organisasi privat, maupun masyarakat untuk dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008) karena fenomenanya sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan membahas mengenai proses *collaborative governance* dalam penyediaan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Dalam teori Ansell dan Gash dijelaskan lima tahap dalam proses kolaboratif sehingga peneliti dapat dengan mudah mengidentifikasi bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan.

1.5.2.5 Faktor Penghambat Kolaborasi

Government of Canada (dalam Corntassel dan Holder, 2008) memaparkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kolaborasi, antara lain:

1. Faktor Budaya

Ketergantungan pada proses dan kurangnya keberanian mengambil peluang dan terobosan baru dari seluruh pemangku kepentingan menjadikan budaya sebagai salah satu hal yang menghambat efektivitas kolaborasi. Kolaborasi akan gagal, apabila: pemerintah terus bertindak secara *top-down* ketika bekerja sama dengan pihak lain; pemerintah tetap menjadi pihak yang dominan; kesepakatan berdasarkan mentalitas egaliter dan kooperatif tidak dilaksanakan; partisipasi pemangku kepentingan sering kali dipandang tidak penting dan tidak perlu; serta taktik perpecahan dan aturan dikooptasi dengan memihak kelompok pembuat kebijakan yang memihak pemerintah dan mengabaikan kelompok anti-pemerintah.

2. Faktor Kelembagaan

Lembaga yang berpartisipasi dalam kolaborasi, khususnya pemerintah, mempunyai kecenderungan untuk memaksakan struktur hierarki pada lembaga lain yang berpartisipasi sehingga kelembagaan tersebut sebenarnya bisa menjadi penghambat bagi kolaborasi. Kolaborasi memerlukan organisasi horizontal antara pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga-lembaga yang masih menganut struktur, akuntabilitas, dan arah kebijakan vertikal tidak cocok untuk berpartisipasi dalam kolaborasi karena kolaborasi sering kali dilakukan secara spontan sehingga tidak selalu harus mematuhi peraturan resmi yang

lazim terjadi di perusahaan publik. Selain itu, akuntabilitas dalam kolaborasi lebih menekankan responsibilitas daripada aturan formal.

3. Faktor Politik

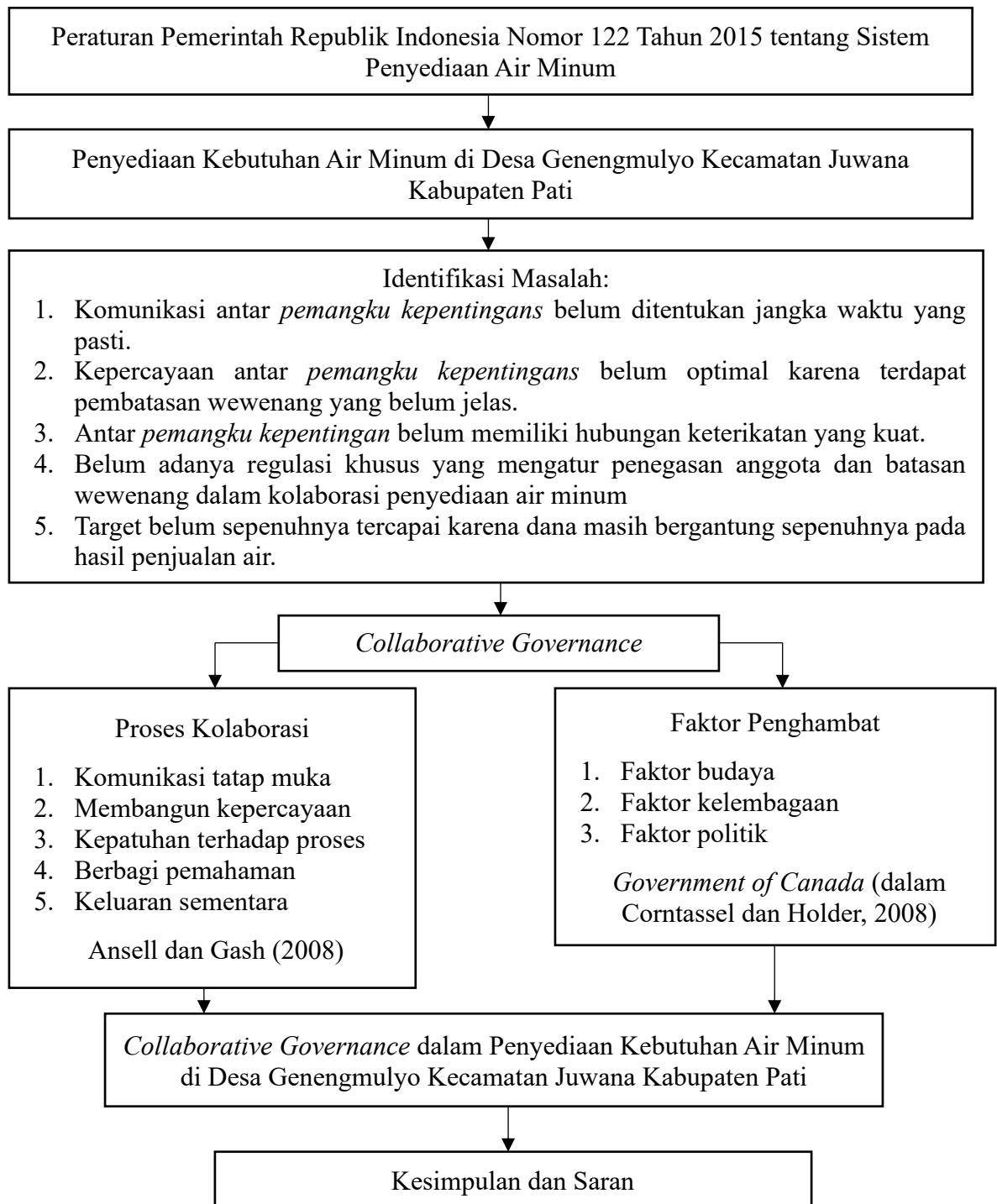
Ketika para pemimpin tidak bertindak *out of the box* untuk mencapai tujuan politik yang sulit dan bertentangan maka kolaborasi dapat terhambat. Perubahan kesepakatan dan perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan yang telah terjalin sejak awal perjanjian kerjasama, serta munculnya kepentingan baru antar pemangku kepentingan, termasuk pimpinan setiap pemangku kepentingan, menjadi faktor tambahan yang berkontribusi terhadap kegagalan kolaborasi.

1.5.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penyediaan air minum diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Peneliti menganalisis pelaksanaan penyediaan air minum tersebut sesuai kondisi lapangan dengan acuan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008), serta faktor penghambat pelaksanaannya mengacu teori *Government of Canada* (dalam Corntassel dan Holder, 2008). Dari analisis tersebut ditemukan sejumlah masalah dalam proses kolaboratif, di antaranya belum ada pertemuan rutin, pembatasan wewenang belum jelas, antar pemangku kepentingan tidak memiliki keterikatan yang kuat, belum ada regulasi khusus mengenai proses kolaborasi, dan target belum tercapai sepenuhnya akibat kekurangan sumber dana. Permasalahan terjadi karena terdapat faktor-faktor yang menghambat, baik dari segi budaya, kelembagaan, maupun politik. Oleh karena itu, penelitian dilaksanakan dengan harapan dapat

memberikan saran perbaikan pelaksanaan *collaborative governance* dalam penyediaan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo.

Gambar 1.6 Kerangka Berpikir



Sumber: Literatur Peneliti

1.6 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Fenomena	Definisi Konsep	Sub Fenomena	Operasional
<i>Collaborative governance</i>	Serangkaian aktivitas yang dikelola oleh organisasi lintas sektor, baik bersifat legal maupun semi legal dengan prinsip-prinsip organisasi yang tersistem dan terpadu melalui suatu proses, meliputi komunikasi tatap muka, membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan, kepatuhan terhadap proses, berbagi pemahaman, dan hasil sementara.	Komunikasi tatap muka	1. Tujuan dan posisi masing-masing pemangku kepentingan 2. Negosiasi yang baik
		Membangun kepercayaan	1. Waktu 2. Komitmen jangka panjang 3. Keyakinan pada informasi yang disampaikan antar pemangku kepentingan 4. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
		Kepatuhan terhadap proses	1. Hubungan profesional 2. Saling ketergantungan antar pemangku kepentingan 3. Motivasi untuk aktif berpartisipasi
		Berbagi pemahaman	1. Menegaskan anggota 2. Adanya aturan 3. Menentukan proses pelaksanaan kolaborasi 4. Pemeliharaan jaringan
		Keluaran sementara	1. Pencapaian kecil

Sumber: Literatur Peneliti

Faktor penghambat merupakan faktor yang memiliki sifat menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu akibat dari pengaruh budaya, pengaruh institusi, dan pengaruh politik. Dalam *collaborative governance*, faktor penghambat dari proses kolaborasi, antara lain:

1. Faktor Budaya, yang terjadi karena adanya kebiasaan saling ketergantungan pada suatu prosedur sehingga tidak memiliki keberanian dalam mengambil risiko.
2. Faktor kelembagaan, yang disebabkan oleh kecenderungan lembaga-lembaga yang berkaitan menerapkan struktur hierarki kepada lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi, khususnya pemerintah.
3. Faktor politik, yang timbul dari kegagalan pemimpin dalam berinovasi dalam rangka mencapai agenda politik yang rumit dan bertentangan.

1.7 Argumen Penelitian

Dilihat dari data akses air minum layak dan aman yang belum mencapai 100%, serta target nasional dan internasional yang mengharuskan 2030 mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs), menjadikan permasalahan air minum suatu urgensi bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, bahwa negara menyerahkan air sebagai hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehingga dapat hidup sehat dan bersih. Pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk terus berupaya mencapai tujuan 100% masyarakat dapat mengakses air minum yang layak, yang sejauh ini telah dicapai oleh 90,8% penduduk. Sasaran kota dan desa dalam RPJMN 2020–2024 adalah 100% akses air

minum dasar dan sanitasi. Percepatan pembangunan atau penyediaan akses air minum yang memadai di seluruh Indonesia diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Upaya yang dapat dilakukan dalam percepatan penyediaan akses air minum salah satunya adalah memastikan seluruh daerah dijangkau oleh pelayanan di bidang air minum. Pemerintah Kabupaten Pati berupaya menjalankan berbagai program untuk memperluas akses air minum layak bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati. Program-program tersebut diselenggarakan oleh Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati sebagai *lead sector*. Kompleksitas tugas pokok dan fungsi Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati serta kompleksitas penyelenggaraan SPAM, menjadikan Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati tidak dapat bekerja sendiri dalam mengelola air minum di Kabupaten Pati, khususnya pada daerah pesisir yang memiliki air cenderung lebih asin daripada daerah lainnya. Hal tersebut memerlukan kerjasama antar pemerintah maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Pati. Agar kolaborasi dapat berfungsi sesuai dengan tanggung jawab utama dan peran masing-masing pemangku kepentingan, proses khusus harus diikuti untuk menghasilkan peraturan yang sesuai. Dalam hal ini, Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati bekerjasama dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, yang meliputi Sekretariat Daerah, BAPPERIDA, dan DPUTR di mana Pemerintah Daerah berperan sebagai penyedia air baku, merencanakan SPAM, dan mengawasi kinerja Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati, serta masyarakat berperan sebagai kelompok sasaran yang dapat sekaligus mengawasi kinerja dari Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati. Dari hal tersebut, ditemukan terdapat berbagai macam

permasalahan, baik masalah internal dari masing-masing pemangku kepentingan yang berkolaborasi maupun masalah eksternal yang berasal dari faktor lingkungan sasaran program sehingga topik ini penting untuk diteliti untuk mendalami bagaimana proses kolaboratif dapat terjadi dan hambatan serta permasalahan apa saja yang dihadapi selama kolaborasi berlangsung.

1.8 Metode Penelitian

Metode yakni pendekatan terorganisir dan metodis untuk mencapai suatu tujuan (Trisliatanto, 2019). Penelitian adalah proses mencari informasi (Sujarweni, 2014). Seperangkat prosedur ilmiah digunakan dalam pendekatan penelitian untuk mengumpulkan data atau menarik kesimpulan dari gejala tertentu (Anggito dan Setiawan, 2018). Jadi jelas bahwa metode penelitian adalah suatu rangkaian ilmiah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menemukan titik tengah suatu permasalahan. Metode penelitian bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan tahapan-tahapan penelitian yang telah dirancang sebelumnya, mulai dari identifikasi masalah sampai dengan penafsiran dan penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, peneliti berusaha menggambarkan masalah yang berkaitan dengan “Proses *Collaborative Governance* dalam Penyediaan Kebutuhan Air Minum di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”.

1.8.1 Tipe Penelitian

Pasolong (2012) menjelaskan tipe yang terdapat di dalam penelitian, antara lain:

1. Penelitian Deskriptif (Penggambaran)

Penelitian dengan sifat deskriptif menggambarkan keadaan-keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan. Situasi saat ini dijelaskan, dicatat, dianalisis, dan diinterpretasikan dalam tipe ini. Tujuan dilakukannya penelitian semacam ini adalah untuk mengkaji korelasi antar fenomena dan mengumpulkan beberapa fakta aktual. Penelitian ini tidak menguji hipotesisnya, namun data disajikan sebagai informasi dengan tingkat objektivitas yang tinggi. Penelitian deskriptif ini memiliki kelebihan dalam menjelaskan sebuah keadaan dibandingkan dengan tipe penelitian yang lain, akan tetapi penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan dan menyusun data.

2. Penelitian Eksploratif (Penjajakan)

Penelitian terbuka tanpa hipotesis disebut sebagai penelitian eksploratif. Bentuk penelitian ini sering dijadikan sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian deskriptif karena masih minimnya pengetahuan dalam melakukan penelitian mengenai gejala-gejala yang ingin diteliti. Permasalahan yang dikemukakan oleh penelitian ini dapat dirumuskan secara lebih rinci dengan mengkaji seluruh bukti secara menyeluruh. Menurut Kotler (dalam Pirmanto, dkk., 2016), penelitian eksploratif merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu hal baru yang tidak diketahui dan dipahami oleh peneliti secara baik. Penelitian ini mempunyai sifat mengkaji secara mendasar karena peneliti belum mempunyai data awal yang menjadi latar belakang penelitian.

3. Penelitian Explanatory (Penjelasan)

Penelitian penjelasan melibatkan pengujian hipotesis yang sudah ditentukan atau melakukan penelitian untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, artinya data akan diucapkan, ditulis, atau kedua-duanya (tanpa menggunakan angka atau statistik) dan akan didasarkan pada informasi yang diberikan pihak yang diamati. Penelitian dilakukan secara organik dengan metode kualitatif atau naturalistik, yang memungkinkan temuan mencerminkan informasi yang ditemukan melalui observasi. Tujuan peneliti untuk menganalisis dan mendeskripsikan *collaborative governance* dalam penyediaan air minum di Desa Genengmulyo, menyebabkan dipilihnya desain penelitian ini.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian, yakni lokasi dilakukannya penelitian. Situs penelitian memuat informasi tentang data-data yang diperlukan (Sujarweni, 2014). Langkah terpenting dalam melakukan penelitian kualitatif adalah memilih lokasi penelitian karena memungkinkan identifikasi subjek dan tujuan penelitian. Kemampuan untuk melakukan penelitian dengan lebih mudah akan dihasilkan dari hal ini. Lokasi penelitian bisa di mana saja, peneliti memutuskan mengumpulkan data primer sehingga memilih melakukan penelitian pada:

1. Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati;
2. BAPPERIDA Kabupaten Pati;
3. DPUTR Kabupaten Pati; dan

4. Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian, yaitu perseorangan maupun sekelompok orang yang akan ditanyai mengenai suatu fakta atau pandangan pribadi. Penelitian ini terdapat informan utama yang dapat memberikan deskripsi yang relevan, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan dengan mempertimbangkan pemahaman terhadap fokus penelitian. Untuk mencakup semua pihak yang berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, peneliti memerlukan sejumlah informan yang memiliki kepentingan, antara lain:

Tabel 1.5 Daftar Informan

No.	Instansi	Aktor yang Terlibat
1.	Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati	Bagian Perencanaan
		Bagian Produksi dan Distribusi
		Bagian Hubungan Langganan
2.	BAPPERIDA Kabupaten Pati	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3.	DPUTR Kabupaten Pati	Bidang Cipta Karya
4.	Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati	Masyarakat Pelanggan

Sumber: Hasil penentuan informan metode *purposive sampling*, 2024.

Informan ditentukan dengan mempertimbangkan aktor yang paling dekat dengan masyarakat sehingga tidak semua pemangku kepentingan dalam penyediaan air minum di Kabupaten Pati menjadi informan dalam penelitian ini.

1.8.4 Jenis Data

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa ada dua kategori data yang berbeda, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan, yakni kualitatif. Informasi yang berupa kata-kata, kertas, dan gambar disebut sebagai data kualitatif.

1. Kata-kata, yaitu peneliti mencatat sumber data primer melalui wawancara atau observasi yang menggabungkan tindakan melihat, mendengar, dan bertanya. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti melihat kondisi bagaimana Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati yang berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait penyediaan air minum di daerah pesisir dan tambak, khususnya di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati sehingga peneliti dapat mengidentifikasi fenomena-fenomena yang ada dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam penyediaan kebutuhan air minum di Desa genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.
2. Dokumen, merupakan data yang diambil peneliti dari berbagai referensi buku dan jurnal, serta dokumen pendukung lainnya, seperti regulasi. Dokumen tersebut merupakan dokumen resmi dari Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati, yang di dalamnya memuat komponen-komponen yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam penyediaan kebutuhan air minum, khususnya di daerah Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.
3. Gambar, yang diambil saat peneliti melakukan pengamatan dengan informan dan kondisi sebenarnya di lapangan.

1.8.5 Sumber Data

Sugiyono (2015) mendefinisikan sumber data, yaitu segala sesuatu yang memberikan nilai edukasi bagi berlangsungnya kajian data penelitian. Sumber data dikategorikan sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Informasi semacam ini biasanya dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai sumber terpercaya. Pengumpulan data primer dilakukan khusus untuk mengatasi permasalahan penelitian. Pengumpulan data primer menggunakan metode observasi dan wawancara.
2. Data sekunder, yakni data yang didapat secara tidak langsung atau bukan dari sumber asalnya, misalnya melalui perantara pihak ketiga atau dengan menggunakan perangkat lunak analisis dokumen. Data sekunder yang dikumpulkan peneliti didasarkan pada studi pustaka atau dokumentasi.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan instrumen sebagai alat bantu agar penelitian dapat terlaksana secara sistematis, antara lain:

1. Wawancara

Menurut Trisliatanto (2019), wawancara adalah suatu dialog dengan tujuan tertentu yang melibatkan dua orang, yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan narasumber sebagai penjawab. Peneliti memakai teknik wawancara semi terstruktur, yakni wawancara dengan lebih terbuka dengan mengembangkan lebih lanjut pertanyaan yang disiapkan, serta

mengajukan pertanyaan lanjutan atas pernyataan informan. Melalui media wawancara, peneliti mengharapkan dapat mengetahui secara mendalam mengenai proses *collaborative governance* dalam penyediaan kebutuhan air minum di Kabupaten Pati, khususnya di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Wawancara dilakukan tidak hanya dengan pemangku kepentingan utama, yaitu Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati, namun juga dengan pemangku kepentingan pendukung lainnya yang terlibat.

2. Teknik Pengamatan/Observasi

Menurut Pasolong (2012), observasi, yakni proses melakukan pengamatan langsung dan terorganisir terhadap berbagai gejala yang diteliti. Data yang dikumpulkan dengan pendekatan ini dikatakan valid apabila sesuai dengan tujuan penelitian, sesuai dengan rencana peneliti, dan pencatatannya sistematis serta dapat mengatur reliabilitas dan validitasnya. Peneliti akan mempelajari berbagai proses kolaborasi pemerintah dalam menyediakan air minum dan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif penyediaan air minum pada tahap observasi ini.

3. Dokumentasi atau Studi Pustaka

Menurut Nazir (dalam Trisliatanto, 2019), studi kepustakaan yakni teknik pengumpulan data yang melibatkan penelusuran buku, artikel, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan. Peneliti menggunakan buku, jurnal, makalah, hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, dan disertasi), serta sumber lainnya yang relevan (internet, tabloid, laporan kinerja, surat, buku harian, arsip gambar, notulensi konferensi, jurnal kegiatan, dan lain

sebagainya) yang berkaitan dengan pelaksanaan *collaborative governance* dalam penyediaan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data, yakni tindakan menyusun serta mengkategorikan data dalam pola, kategori, dan dasar deskripsi sehingga memunculkan tema dan hasil sementara seperti yang disarankan oleh data (Majid, 2017). Menurut Miles dan Huberman (dalam Rofiah, 2022), prosedur analisis data meliputi:

1. Pengumpulan data, dilakukan sebelum, selama, dan setelah penelitian. Pada tahapan ini, peneliti melakukan menyeleksi data yang diperoleh. Data yang dianggap sesuai dengan fokus penelitian disusun dan dihubungkan dengan data pendukung lainnya sehingga membentuk data yang saling berkaitan. Tahapan ini merupakan tahapan bagi peneliti untuk merangkai kata yang sesuai dengan kaidah penulisan yang mudah dipahami.
2. Reduksi data, yaitu proses penyusunan dan standarisasi seluruh jenis data menjadi satu dokumen yang akan diperiksa. Dalam tahap ini, peneliti bertindak selektif dengan menentukan fenomena-fenomena mana yang dianggap paling penting, hubungan mana yang paling signifikan, dan jenis informasi apa saja yang perlu dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya peneliti memfokuskan data yang memiliki kaitan dengan rumusan masalah, kemudian data yang telah terkumpul dievaluasi hingga membentuk golongan data dalam satu pola.
3. Penyajian data, yakni membuat kesimpulan dan mengambil tindakan dari kumpulan data yang telah terorganisir dengan baik. Tahapan penyajian data

dimulai dengan berbagai sumber data yang berbeda, kemudian data yang telah didapatkan dijadikan sebagai suatu turunan yang dapat menerangkan fenomena yang terjadi.

4. Penarikan kesimpulan, yaitu tahap menarik kesimpulan dari analisis yang dilakukan, serta melakukan verifikasi kembali dengan bukti yang ditemukan di lapangan. Pada tahap terakhir ini, peneliti menelaah hasil data yang telah dibuktikan kebenarannya, kemudian melakukan penarikan kesimpulan yang berguna untuk menjelaskan hasil penelitian secara keseluruhan.

1.8.8 Kualitas Data

Penelitian kualitatif diperlukan ketaatan pada standar kredibilitas, di mana perubahan dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dihasilkan memiliki tingkat kebenaran dan keterpercayaan data yang tinggi serta juga sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan (Moleong, 2009). Triangulasi adalah proses yang dapat digunakan untuk memverifikasi keakuratan data bergantung pada sumbernya. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk membandingkan dan mengkajinya secara berulang-ulang agar dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan keakuratannya.

Jika ingin memahami data yang dikumpulkan secara lebih luas, berubah-ubah, atau bertentangan maka nilai yang melekat pada teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi adalah langkah yang paling tepat. Hasilnya, ketika prosedur triangulasi digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, dihasilkan data yang akurat dan konsisten. Ketika triangulasi digunakan, datanya lebih kuat

dibandingkan ketika hanya satu pendekatan yang digunakan. Menurut Moleong (2009), langkah-langkah triangulasi data, sebagai berikut:

1. Membandingkan informasi yang didapatkan melalui kegiatan observasi dengan informasi yang diperoleh dari kegiatan wawancara.
2. Membandingkan pernyataan yang ditujukan kepada masyarakat luas dengan pernyataan yang ditujukan kepada individu.
3. Membandingkan temuan penelitian dengan pernyataan publik mengenai situasi yang ada.
4. Membandingkan situasi dan sudut pandang seseorang ketika memberikan pendapat, terutama berdasarkan kedudukan dan latar belakang pendidikannya.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Peneliti mengecek ulang informasi dari hasil wawancara dan observasi untuk mengetahui apakah data yang didapat sudah benar dan saling berkaitan. peneliti melakukan triangulasi sumber, sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan perbandingan antara hasil observasi dan wawancara dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam *collaborative governance* dalam penyediaan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.
2. Peneliti membuat perbandingan hasil wawancara dengan isi dokumen pendukung berkaitan dengan *collaborative governance* dalam penyediaan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.